

ANOMALI DALAM KHAZANAH ARSIP: AFDEELING ATJEH ZAKEN DALAM ALGEMENE SECRETARIE (1873-1904)

Dharwis Widya Utama Y.

Abstract

Algemene Secretarie was the government institution established in 1819. Algemene Secretarie assigned to advise and inform the Governor-General, to assess any proposal submitted by the head of department, edit all forms of decision (besluit), to edit the government newspaper, to take care of variety reports included statistical data that was sent by gewestelijke stukken and made by Dutch Government and reported to the Central Government in the Netherlands and also to coordinate the information among institutions in the Netherlands-Indie.

In addition, the most important thing that Algemene Secretarie obtained duties was to keep archives. Algemene Secretarie kept the VOC archives period (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) and British rule period which was also called Engelsche Tussenbestuur. It was their duties to save all files of Algemene Secretarie that made them to create accessible archival systems in the Netherlands-Indie.

Algemene Secretarie collections are the backbone of the Netherlands-Indie archives. They contained all activities, decisions and policies made by the Governor-General. The archives were the Netherlands-Indie recorded, arranged, and kept by the Algemene Secretarie. Similarly, they had a duty to correspondent with other departments such as Burgelijke Openbare Werken (BOW/Public Works Department during the Netherlands-Indie), Mijnwezen (Department of Mines during the Netherlands-Indie). From year to year, Algemene Secretarie had been growing so rapidly. Many new bureaus and sections conducting various tasks were developed, such as the Bureau of Indigenous Affairs (Bureau voor de Inlandsche Zaken), Section of Statistics (Afdeling Statistiek), and the Bureau of Preaching (Press Bureau). The more organization units grew the more function of keeping archives arose. This made Algemene Secretarie had a duty which was similar with instorage archives.

The interesting facts which were found was that Aceh collections were kept separatedly with other regions such as Sumatra, Java en Madoera, Borneo, and Groote Oost. Obviously, this indicated special meaning at that time. The partitioning was related to the retrieval process the Aceh archives. The proceedings, however, showed us that the policy of the Netherlands-Indie at that time was focused on what happened in Aceh. It can be seen from the Algemene Secretarie collections which big parts of the collections had called Afdeling Atjeh Zaken.

Keyword: *algemene secretarie, khazanah arsip, afdeling atjeh zaken, Aceh.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khazanah arsip⁸⁴ adalah kekuatan dari lembaga kearsipan baik daerah maupun pusat. Semakin bervariasi dan beragamnya khazanah arsip dari sebuah lembaga kearsipan semakin banyak pula informasi yang dapat diketahui. Begitu pula dengan Arsip Nasional Republik Indonesia⁸⁵ sebagai lembaga kearsipan pusat harus memiliki khazanah arsip yang beragam baik secara kualitas dan kuantitas.

Khazanah arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu arsip konvensional, arsip media baru, dan arsip kartografi.⁸⁶ Arsip konvensional dapat dibagi 2 (dua) yaitu arsip konvensional periode kolonial dan arsip pasca kemerdekaan. Adapun khazanah arsip periode kolonial terdiri khazanah arsip VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), pemerintahan Inggris (*Engelsche Tussenbestuur*)⁸⁷, pemerintahan Hindia-Belanda (*Nederlands-Indie*), dan kekuasaan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Pada khazanah Pemerintahan Hindia Belanda terdapat khazanah arsip *Algemene Secretarie* (mirip Sekretariat Negara pada Masa Republik Indonesia), *Binnenlands-Bestuur* (mirip Kementerian Dalam Negeri pada Masa Republik Indonesia), *Financien* (mirip Kementerian Keuangan pada Masa Republik Indonesia), *Cultures* (mirip Kementerian Pertanian pada

⁸⁴ Khazanah arsip adalah jumlah keseluruhan arsip yang disimpan di pusat arsip atau depot. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi, *Terminologi Kearsipan Indonesia*, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.103

⁸⁵ Pada awalnya Arsip Nasional bernama *Landsarsachief* yang berdiri pada tahun 1892-1942 dan tahun 1947-1949 Arsip Nasional kemudian berubah menjadi Arsip Negeri pada tahun 1945-1947. Pada tahun 1950-1959 Arsip Nasional menjadi Arsip Negara dan akhirnya menjadi Arsip Nasional pada tahun 1959 sampai dengan sekarang. Lihat Mona Lohanda, Sulistyio Basuki, dkk, *Arsip Nasional Republik Indonesia: Dalam Gerak Langkah 50 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1996 hal.4-21.

⁸⁶ Arsip konvensional adalah arsip-arsip yang informasinya terekam dalam media kertas yang meliputi tulisan tangan dan ketikan. Arsip media baru adalah arsip-arsip yang isi informasi dan bentuk fisiknya direkam elektronik dengan menggunakan peralatan khusus. Arsip Kartografi adalah informasinya tertulis dalam bentuk grafik atau foto metrik. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi, *Terminologi Kearsipan Indonesia*, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.16-17.

⁸⁷ *Engelse Tussenbestuur* adalah masa kekuasaan Inggris di Jawa sekitar tahun 1811-1816. Lihat Mona Lohanda, "Mengenal Sumber Sejarah" dalam Jurnal Kearsipan, Volume 5, ANRI, 2010, hal. 137.

Masa Republik Indonesia), *Gouvernementsbedrijven, Mijnwezen* (mirip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Masa Republik Indonesia), *Burgerlijke Openbare Werken* (disingkat BOW mirip Kementerian Pekerjaan Umum pada Masa Republik Indonesia), dan *gewestelijke stukken*.⁸⁸

Khazanah arsip *Algemene Secretarie* merupakan tulang punggung arsip pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Semua kegiatan, keputusan, dan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dicatat, diatur, dan disimpan oleh *Algemene Secretarie*. Begitu pula urusan korespondensi dengan departemen-departemen lain seperti *Burgelijke Openbare Werken* (BOW) dan *Mijnwezen*. Bahkan dari tahun ke tahun, khazanah arsip *Algemene Secretarie* berkembang begitu pesat sehingga tumbuh biro-biro dan bagian-bagian baru yang memiliki tugas spesifik daripada sebelumnya seperti Biro Urusan Pribumi (*Bureau voor de Inlandsche Zaken*), Bagian Statistik (*Afdeeling Statistiek*), dan Biro Pemberitaan (*Pers Bureau*). Tentu saja fungsi kerja di bidang kearsipan juga berkembang. Hal tersebut membuat *Algemene Secretarie* memiliki penambahan tugas dalam penyimpanan arsip. Hal itu dibuktikan dengan telah diresmikannya jabatan *landarchivaris* (arsiparis) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan arsip pada tahun 1892.⁸⁹ Dengan adanya *landarchivaris* tentunya arsip-arsip yang masuk di dalam *Algemene Secretarie* dapat dikelola dengan baik. Bukti awal adanya sistem pengelolaan yang baik adalah dengan dikelompokkannya arsip sesuai dengan jenis-jenisnya. Dari jenis-jenis arsip tersebut dapat dikelompokkan sesuai dengan *series-series* tertentu seperti *toegangen* dan *verbaal*.

B. Rumusan Masalah

Dalam khazanah *Algemene Secretarie*, terdapat dua pembagian besar yaitu *series toegangen* (jalan masuk) dan *series verbaal*. Dengan volume khazanah arsip yang besar, tentunya khazanah arsip *Algemene Secretarie* memiliki klasifikasi yang kompleks. Hal yang paling menarik adalah adanya pengelompokan arsip mengenai Aceh yang dipisahkan dengan daerah-daerah lain seperti *Sumatra, Java en Madoera, Borneo, dan Groote Oost*. Dengan dipisahkannya Aceh dengan daerah lain memberikan pemikiran bahwa Aceh memiliki arti khusus pada masa Hindia-Belanda. Begitu pula dengan kaitannya dengan sarana dalam proses temu balik terutama dalam *toegangen* (jalan masuk). Dengan adanya perlakuan khusus mengenai Aceh, dimungkinkan pula terdapat kode khusus untuk Aceh. Dalam hal ini terdapat

⁸⁸ Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan di ruang layanan informasi Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2012 dengan melihat daftar katalog yang ada di ruang tersebut.

⁸⁹ *Landarchivaris* pertama adalah Mr Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga 1905. *Landsachivaris* merupakan cikal bakal profesi arsiparis pada masa Republik Indonesia. Lihat Mona Lohanda, Sulisty Basuki, dkk, *Arsip Nasional Republik Indonesia: Dalam Gerak Langkah 50 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1996 hal.12

pemikiran bahwa Pemerintah Hindia Belanda memiliki perhatian khusus atas Aceh. Hal itu dapat dilihat dari khazanah arsip *Algemene Secretarie* memiliki bagian yaitu dengan nama *Afdeeling Atjeh Zaken*.

Dalam tulisan ini, sesuai dengan penjelasan diatas, berusaha menjelaskan mengapa dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie* terdapat bagian *Afdeeling Atjeh Zaken*. Dengan dinamakannya *Afdeeling Atjeh Zaken* dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie* memiliki tujuan tertentu. Tulisan ini berusaha melihat anomali dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie* dilihat dari kasus *Afdeeling Atjeh Zaken*. Dengan demikian rumusan masalah dalam kajian ini adalah: **mengapa terdapat bagian *Afdeeling Atjeh Zaken* dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie* yang volumenya terbesar dalam masa Hindia Belanda?**

C. Maksud Dan Tujuan

Dalam setiap khazanah arsip memiliki jalan masuk dan sarana temu balik yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda tentunya perlu dipelajari lebih dalam agar memudahkan kita dalam mencari arsip yang dicari.

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan terjadi ketidakwajaran atau anomali dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie* dengan dijelaskan salah satu bagian yang disebut dengan *Afdeeling Atjeh Zaken*.

D. Manfaat

Dengan ditulisnya penelitian ini supaya pembaca yang merupakan pengguna arsip mampu mengetahui keganjilan dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie* serta memudahkan mereka untuk mengidentifikasi dalam proses pencarian arsip yang berkaitan dengan Aceh ataupun Perang Aceh pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

E. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini terfokus pada khazanah arsip *Algemene Secretarie* yang memiliki volume arsip terbesar dalam khazanah arsip statis. Tentunya khazanah arsip *Algemene Secretarie* merupakan khazanah arsip yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dimulai pada masa setelah Pemerintahan Inggris (*Engelsche Tussen Bestuur*) yaitu tahun 1818-1942. Namun karena khazanah arsip ini hanya membahas sebagian kecil dari khazanah arsip *Algemene Secretarie* yaitu yang dimulai dari tahun 1873 sampai dengan 1904 sehingga periode penelitian ini dimulai dari tahun 1873 sampai dengan 1904.

F. Metodologi Penelitian

Tulisan ini lebih tepat disebut dengan hasil analisis dari kerangka berpikir dari berbagai pustaka yang berhasil dirangkum dalam satu kesatuan pemikiran. Tentu saja hasil pemikiran ini belum tentu mewakili keseluruhan kebenaran kondisi khazanah arsip yang diteliti. Oleh karena itu diperlukan metode penelitian yang tepat antara lain metode pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan dan juga untuk mendapatkan data primer dan sekunder sehingga memperjelas berbagai hal. Selain itu juga menggunakan metode observasi dengan melihat keadaan di Ruang Baca Arsip Nasional Republik Indonesia serta di Ruang Penyimpanan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk melengkapi data primer yang tidak didapatkan melalui metode pustaka. Metode observasi ini sangat penting karena untuk mengetahui bagaimana sistem kearsipan pada khazanah arsip yang diteliti berjalan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang mendeskripsikan tentang keanehan yang terjadi pada objek sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *naturalistic* untuk meneliti kondisi objek yang alami serta ditambah dengan pendekatan historis dengan membaca literatur yang berkaitan dengan Aceh pada periode yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) penelitian pustaka guna memperoleh data primer dan sekunder sehingga diharapkan dapat memperjelas berbagai hal yang ditemukan dalam penelitian kualitatif; (2) observasi di lapangan untuk mengetahui dan melengkapi data primer, hal ini diamati oleh penulis selama mengolah arsip *Algemene Secretarie Afdeeling Atjeh Zaken* yaitu selama 6 (enam) bulan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*) dimana proses analisis data dimulai sejak sebelum dan selama proses di lapangan (*model spradley*) bersamaan dengan pengumpulan data dan dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik.

G. Kerangka Teori

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁹⁰

⁹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dari konsep kearsipan di atas terdapat empat unsur utama yaitu benda, aktivitas, pelaku, dan konteks. Benda adalah dalam bentuk fisik baik peristiwa ataupun kegiatan. Aktivitas adalah berupa kegiatan seperti mengklasifikasikan, menyimpan, memelihara, menyusutkan, melestarikan, memberikan pelayanan. Pelaku dalam hal ini dalam organisasi atau individu. Konteks adalah tempat melakukan aktivitas.⁹¹

Arsip merupakan bentuk informasi yang begitu penting. Dari arsip, kita mengetahui banyak hal dan berbagai macam pengetahuan terutama informasi di masa lalu saat peristiwa itu terjadi. Arsip adalah dokumen yang dibuat, diterima, diakumulasikan oleh orang atau organisasi dalam tugasnya dalam hubungan korespondensi serta disimpan karena sifatnya yang memiliki kegunaan yang berkelanjutan. Arsip selalu diidentikkan dengan organisasi, agen atau program yang bertanggung jawab dalam menyeleksi, merawat dan menggunakan arsip sebagai fungsi yang berkelanjutan. Selain itu arsip juga identik dengan penyimpanan, bangunan atau tempat yang didedikasikan untuk menyimpan, merawat, dan menggunakan arsip. Dalam bentuk satuan, arsip merujuk pada spesifik bentuk satuan atau kelompok dari rekaman dari fungsi yang berkelanjutan dari organisasi atau individu yang merupakan sumber daya yang penting.⁹²

Arsip memiliki banyak perbedaan dan kategorisasi. Perbedaan dan kategorisasi contohnya arsip dinamis, arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan arsip statis. Khazanah arsip *Algemene Secretarie* merupakan bentuk dari kategori arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis masa *retensi*⁹³nya, dan berketerangan dipermanenkan⁹⁴ yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan.⁹⁵

Untuk khazanah arsip terutama arsip statis dalam masa Hindia Belanda, tidak semuanya bisa diakses. Hal ini salah satunya tergantung dari arsiparis⁹⁶ yang membuat deskripsinya serta bagaimana proses untuk mencarinya. Khazanah arsip statis di masa Hindia Belanda harus disertai dengan pembuatan inventaris⁹⁷ ataupun daftar arsip⁹⁸ yang dibuat pada masa

⁹¹ Imam Gunarto dalam "Memahami Arsip dari Filsafat Ilmu: Kajian Awal tentang Ilmu Kearsipan" dalam Jurnal Kearsipan, Volume 5, ANRI, 2010, hal. 40.

⁹² Sue McKemmish, "Introducing Archives and Archival Programs" dalam *Keeping Archives Second Edition*, Edited by Judith Ellis, Victoria: Thorpe in association with The Australian Society of Archivists Inc, 1993, hal.2.

⁹³ Retensi adalah lamanya arsip yang harus disimpan dalam suatu unit kerja/organisasi pencipta arsip..

⁹⁴ Dipermanenkan adalah keterangan yang diputuskan dalam Jadwal Retensi Arsip.

⁹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1.

⁹⁶ Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Lihat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1.

⁹⁷ Inventaris adalah hasil kegiatan untuk mendata, mencatat, mengelompokkan arsip berdasarkan prinsip-prinsip kearsipan.

sekarang harus mampu mengakses arsip-arsip yang pada masa Hindia Belanda sulit diakses. Keadaan Ruang Baca Arsip pada masa Hindia Belanda sangat kacau diakibatkan tidak adanya komputer serta pelarangan penggunaan pena serta kesulitan dalam pencarian arsip. Hal tersebut diakibatkan karena banyaknya arsip yang sulit dijangkau baik secara letaknya maupun penemuannya.⁹⁹

Arsip statis pada masa Hindia Belanda dibuat hanya untuk kepentingan organisasinya sendiri sehingga hanya organisasi pencipta yang bisa mengaksesnya. Tugas arsiparis pada masa sekarang yang harus merekonstruksi kembali bagaimana agar arsip-arsip pada masa Hindia Belanda dapat diakses. Hal inilah yang merupakan tugas berat arsiparis agar mampu menciptakan inventaris serta jalan masuk dalam mencari khazanah arsip. Dalam hal ini juga, tanggung jawab tidak serta merta di tangan arsiparis melainkan juga lembaga kearsipan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan arsip terutama arsip statis.

Dalam arsip statis tentunya tidak lepas dari ilmunya. Tentunya dimulai dari proses perencanaan atau yang dikenal dengan istilah *arrangement* sampai dengan proses deskripsi yang akhirnya menjadi sebuah inventaris.

Arrangement adalah *the process physically organizing records in accordance with the accepted archival principles of provenance and original order*.¹⁰⁰ Sedangkan deskripsi adalah *The process of recording standardized information about the arrangement, content, and format of the records so that persons reading the description will be able to determine whether or not the records are relevant to their research*.¹⁰¹

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa proses perencanaan adalah proses pengorganisasian berdasarkan prinsip-prinsip kearsipan yaitu *provenance*¹⁰² dan *original order*¹⁰³. Di lain pihak, deskripsi adalah proses standarisasi informasi mengenai perencanaan, konten, dan format arsip sehingga semua orang mampu membaca sehingga sesuai dengan apa yang diinginkannya.

⁹⁸ Daftar Arsip adalah sarana bantu penemuan informasi arsip berupa rincian uraian informasi arsip berupa rincian uraian informasi materi setiap unit pengelompokannya, pemilikannya, khazanah arsip koleksinya, dan keadaan serta volume arsipnya. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi, *Terminologi Kearsipan Indonesia*, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.97.

⁹⁹ Ann Laura Stoler, *Along the Archival Grain: Thinking Through Colonial Ontologies*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, hal.9

¹⁰⁰ Paul Brunton dan Tim Robinson, "Arrangement and Description" dalam *Keeping Archives Second Edition*, Edited by Judith Ellis, Victoria: Thorpe in association with The Australian Society of Archivists Inc, 1993, hal.222.

¹⁰¹ *Ibid*, 1993, hal.223

¹⁰² *Provenance* atau prinsip asal-usul adalah suatu prinsip yang mengaitkan arsip ke sumber asalnya tanpa melepaskan arsip dan instansi yang menciptakannya. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi, *Terminologi Kearsipan Indonesia*, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.141.

¹⁰³ *Original Order* atau aturan asli adalah arsip harus diatur sesuai dengan aturan yang dipergunakan semasa dinamisnya. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi, *Terminologi Kearsipan Indonesia*, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.142.

PEMBAHASAN DAN ANALITIS

A. Gambaran Umum *Algemene Secretarie*

*Algemene Secretarie*¹⁰⁴ adalah badan pemerintah yang berdiri pada tahun 1819. *Algemene Secretarie* bertugas memberi masukan dan informasi kepada Gubernur Jenderal, mengkaji setiap usulan yang diajukan oleh kepala departemen, mengedit segala bentuk keputusan (*besluit*)¹⁰⁵, mengedit surat kabar pemerintah, mengurus berbagai macam laporan termasuk juga data statistik yang dikirimkan oleh *gewestelijke stukken*¹⁰⁶ dan dijadikan bahan laporan Pemerintah Belanda untuk dilaporkan kepada Pemerintah Pusat di Belanda, dan mengkoordinasikan informasi antar lembaga di Hindia-Belanda.¹⁰⁷

Selain tugas tersebut di atas, tugas yang paling penting adalah memiliki tugas menyimpan arsip.¹⁰⁸ *Algemene Secretarie* memiliki tanggung jawab menyimpan arsip-arsip zaman sebelum Hindia Belanda seperti periode VOC (*Vereenigde Oost-indische Compagnie*)¹⁰⁹ dan periode pemerintahan Inggris atau disebut juga *Engelsche Tussenbestuur*. Dari tugas menyimpan arsip tersebut, *Algemene Secretarie* sekaligus memiliki wewenang dalam membuat kebijakan sistem kearsipan yang mampu diakses pada masa Hindia Belanda.

Kurun waktu khazanah arsip *Algemene Secretarie* adalah dari tahun 1819-1942 dengan arsip tertua berangka tahun 1816. Seluruhnya merupakan arsip kertas namun terkadang dilengkapi dengan arsip peta dan arsip foto yang melengkapi arsip kertasnya. Perlu diketahui pula dalam sistem kearsipan, khazanah arsip *Algemene Secretarie* memiliki sistem yang dinamakan Sistem *Verbaal*¹¹⁰ yang juga dikenal dengan nama *Verbaalstelsel 1823*. Sistem *Verbaal* ini memiliki ciri khas dengan sistem penataan berbentuk *series*¹¹¹ yang berdasarkan tanda pengenal pendaftaran yang resmi. Dalam sistem ini juga dijumpai satu *series* kronologi dari *minuut*¹¹² surat keputusan atau surat keluar. Surat keputusan tersebut dilampiri dengan

¹⁰⁴ *Algemene* dari kata dasar *Algemeen* artinya umum, sedangkan *Secretarie* artinya kantor administrasi balai kota. Lihat Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 49 dan 914.

¹⁰⁵ *Besluit* adalah semua keputusan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal sendiri yang merupakan *series* yang besar dan selalu diminta karena berkaitan dengan kebijakan, reaksi atau regulasi dari berbagai masalah. Lihat Nadia Fauziah Dwiandari, 2010, "Archives Management as a Reflection of Bureaucracy Development: The Case of Transitional Dutch East Indies, 1816-1830" dalam *Jurnal Kearsipan*, Volume 5, ANRI, 2010, hal.98

¹⁰⁶ *Gewestelijke stukken* artinya pemerintah daerah yang merupakan wilayah Hindia Belanda. Lihat Mona Lohanda, 2010, "Mengenal Sumber Sejarah" dalam *Jurnal Kearsipan*, Volume 5, ANRI, 2010, hal. 137

¹⁰⁷ Nadia F. Dwiandari, Dwi Nurmaningsih, dan M.Haris Budiawan, *Guide Arsip Algemene Secretarie (1816) 1819-1950*, Jakarta: Direktorat Pengolahan Kedeputian Bidang Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011, hal 5.

¹⁰⁸ Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 16 tanggal 19 Februari 1819.

¹⁰⁹ VOC berdiri atas inisiatif *landsadvocaat* of Holland, Johan van Oldenbarnevelt untuk mengumpulkan seluruh pedagang di Belanda untuk bekerja bersama termasuk berlayar ke Asia dalam rangka perdagangan. Lihat Femme S. Gaastra, *The Dutch East India Company, Expansion and Decline*, Leiden: Walburg Pers, 2003.

¹¹⁰ Berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda (Koninklijk Besluit) 4 September 1823 Nomor 7

¹¹¹ *Series* atau seri merupakan kelompok arsip yang ditata berdasarkan kesamaan jenisnya. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi, *Terminologi Kearsipan Indonesia*, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.149.

¹¹² *Minuut* adalah lembaran arsip yang disimpan oleh pejabat pembuatnya. Biasanya berupa akta, surat keputusan pengadilan, surat keputusan pejabat suatu lembaga/badan organisasi. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi, *Terminologi Kearsipan Indonesia*, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.120

surat-surat masuk. Dalam *minuut* surat keputusan ini disusun sesuai dengan tanggal surat keputusan atau surat keluar.¹¹³

Khazanah arsip *Algemene Secretarie* memiliki beragam *series* antara lain adalah *toegangen* (jalan masuk), *verbaal*, *duplikaat* (duplikat), *bijlagen* (lampiran), *rondschrijven* (surat edaran), *persoverzichten* (kliping artikel koran), *conduitestaten* (arsip daftar riwayat hidup pegawai disertai laporan kinerja), *traktementenstaten* (daftar gaji pegawai), *verslagen* (arsip berisi konsep laporan), *inlandse zaken* (arsip dari biro urusan dalam negeri), *stamboek* (arsip daftar riwayat hidup disertai dengan daftar pertelaahan dari setiap pekerjaan yang dijalankan), *muntwezen* (arsip di bidang mata uang dan sistem moneter), *boswezen* (arsip di bidang kehutanan), *marine* (arsip di bidang kelautan), *militaria* (arsip di bidang militer), *reizen* (arsip catatan perjalanan), *medica* (arsip kesehatan), *instructie* (arsip tentang instruksi), *statistiek* (arsip statistik), *kontrak* (arsip kontrak), dan *handelingen staten general/Volksraad* (arsip di bidang hukum dan kehakiman).¹¹⁴

Sejak *Algemene Secretarie* memiliki tugas sebagai pusat arsip, arsip yang berada di *Algemene Secretarie* ditata berdasarkan kronologis dan bukan berdasarkan subyek. Selain itu, *Algemene Secretarie* juga menjadikan *index* sebagai jalan masuk. Namun, karena tingginya kebutuhan untuk menemukan kembali, maka penataan arsip tersebut berubah berdasarkan subyek serta meninggalkan tunjuk silang (*verwijsbriefje*) di lokasi dokumen yang diambil. Peran tunjuk silang (*verwijsbriefje*) sangat penting, jika satu kertas kecil itu hilang maka hilanglah informasi yang diinginkan.

Toegangen (jalan masuk) terdiri dari *indeks* (jalan masuk yang berisi kolom-kolom tertentu) nama, *klapper index* (daftar yang disusun secara alfabetis), *klapper agenda* (daftar yang disusun secara geografis yang merujuk pada nomor agenda), agenda (daftar surat masuk yang berisi informasi tertentu), *kaart system* (kartu-kartu berisi informasi tertentu), *controleboeken* (alat kontrol dalam pembuatan indeks), *register besluiten* (daftar keputusan Gubernur Jenderal), *ministerleele dépêche* (buku pencatatan telegram), *register Chinezen* (daftar nama orang China), *register Arabieren* (daftar nama orang Arab), dan *register Japannezen* (daftar nama orang Jepang).¹¹⁵

Dalam *series verbaal* terdapat *besluiten* (kumpulan keputusan yang dibuat Gubernur Jenderal), *resoluties* (kumpulan keputusan yang dibuat Hoge Regering dan Dewan Hindia Belanda), *missive algemene/gouvernement secretaris* (konsep surat keluar), *gedeponeerd*

¹¹³ Tim Puslitbang Arsip Nasional Republik Indonesia, *Sistem Kearsipan Zaman Hindia Belanda*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1991, hal.28

¹¹⁴ Nadia F. Dwiandari, Dwi Nurmaningsih, dan M.Haris Budiawan, *Guide Arsip Algemene Secretarie (1816) 1819-1950*, Jakarta: Direktorat Pengolahan Kedepuitian Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011, hal 38-58.

¹¹⁵ *Ibid*, hal 26-35.

agenda (kumpulan surat masuk yang tidak lagi ditindak lanjuti), *telegram algemene* (kumpulan telegram keluar), *grote bundel* (kumpulan arsip yang mengacu pada subyek atau kasus tertentu, *kabinetsarchieven* (surat-surat yang dibuat langsung oleh gubernur Jenderal), dan *landsarchief* (arsip yang dihasilkan oleh lembaga yang mengurus arsip sebelum tahun 1816).¹¹⁶

Khazanah arsip *Algemene Secretarie* terdapat *besluiten* seperti yang diterangkan diatas adalah berisi kumpulan keputusan Gubernur Jenderal yang terbagi menjadi keputusan yang sifatnya *openbaar* (terbuka) dan *geheim* (penting). Selain itu, terdapat *resolutie* yang dibuat oleh *Hoge Regering*¹¹⁷. Ditambah pula *Missive Algemene/Gouvernement Secretaris (MAS/MGS/BGS)* yang merupakan konsep surat keluar yang tidak memerlukan persetujuan dari *Hoge Regering*. Di samping itu, terdapat *Apostillaire Besluit/Dispositien* yang merupakan keputusan Gubernur Jenderal yang ditulis di pinggir surat masuk.

Selain tersebut diatas, terdapat *Gedeponereerd Agenda* yang merupakan kumpulan surat masuk yang tidak ditindaklanjuti yang dikenal juga *terzijde gelegde agenda* (Tzg.Ag.). Yang terpenting pula adalah *Grote Bundel* merupakan kumpulan arsip yang mengacu pada subyek, kemudian *Kabinetsarchieven* adalah surat-surat yang dibuat langsung oleh Gubernur Jenderal.

B. Penataan Arsip *Algemene Secretarie Afdeeling Atjeh Zaken*

Dalam penataan khazanah arsip *Algemene Secretarie* memiliki kode-kode tertentu. Dalam khazanah arsip tersebut juga memiliki kode khusus untuk *Afdeeling Atjeh Zaken* baik pada *series toegangen* dan *series verbal*. Di dalam *series toegangen* terdapat *index* dari tahun 1873 sampai dengan 1880, *klapper* dari tahun 1873-1877, agenda dari tahun 1875-1876, serta *register besluiten* antara tahun 1873-1876 dan 1878-1880. Dalam *series verbaal* terdapat *gedeponeerd agenda* dari tahun 1873-1880 dan 1884 dan *missive algemene/gouvernement secretaries* dari tahun 1906-1908.¹¹⁸

Dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie Afdeeling Atjeh Zaken* dimulai dengan tahun 1873. Tentunya pada tahun 1873 terdapat peristiwa penting yaitu Perang Aceh. Perang Aceh adalah peperangan yang terjadi antara Kesultanan Aceh dengan Pemerintah Belanda. Perang Dimulai pada tahun 1873 ditandai dengan datangnya Kapal Belanda di Pantai Kotaraja¹¹⁹. Dengan strategi militer serta taktik yang dipersiapkan secara sempurna serta dipimpin oleh

¹¹⁶ *Ibid*, hal.38-50.

¹¹⁷ Dewan tertinggi Hindia Belanda yang terdiri dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Dewan Hindia Belanda

¹¹⁸ Rob Kramer dan A.M. Tempelaars, *Inventaris van het Archief van de Algemene Secretarie, (1816) 1819-1942*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1990, hal.90-93.

¹¹⁹ Sekarang bernama Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43

Jenderal-Jenderal Militer Belanda secara silih berganti seperti J.van Swieten, K. van der Heijden, dan J.B. van Heutsz.¹²⁰ Tentunya, Perang Aceh juga dipimpin tokoh-tokoh besar Aceh seperti Teuku Umar, Panglima Polim, dan Cut Nyak Din.

Perang Aceh sendiri terdiri dari 4 fase peperangan. Fase-fase tersebut antara lain Perang Aceh Pertama dari tahun 1873 sampai dengan 1874, Perang Aceh Kedua dari tahun 1874-1880, Perang Aceh Ketiga dari tahun 1884 sampai dengan 1880, dan fase terakhir adalah Perang Aceh Keempat dari tahun 1898-1942.

C. Analisis *Afdeeling Atjeh Zaken* dalam *Algemene Secretarie*

Algemene Secretarie untuk *Afdeeling Atjeh Zaken* memiliki *series toegangen* (jalan masuk) yaitu *klapper indeks*, *klapper agenda* dan *Controle der Afdeeling*. Pada tahun 1873 jalan masuknya melalui *Controle der Afdeeling AZ* dan *Klapper Indeks AZ*, kemudian tahun 1874 terdiri dari *Klapper Indeks AZ* dan *Klapper Agenda AZ*. Dari tahun 1875 sampai 1880 hanya terdiri dari *Klapper Indeks*. *Klapper Index* merupakan daftar kata tangkap yang disusun dengan alfabetis dan mengacu pada *Index*. *Klapper Agenda* seperti dengan *Klapper Indeks* tetapi mengacu kepada *Agenda*. *Controle der Afdeeling* fungsinya seperti *Cotroleboeken* yang merupakan alat kontrol yang memantau segala jenis keputusan yang dicatat dalam indeks. Selain *series toegangen*, terdapat pula *series verbaal* yang berisi *besluiten*, *gedeponeerd agenda*, dan *algemene/Gouvernement secretaris (MAS/MGS/BGS)*.

Untuk volume terbanyak *Afdeeling Atjeh Zaken* yaitu *series Gedeponeerd Agenda*. Hampir setiap boks terdapat berisi *series Gedeponeerd Agenda*. Tentunya *Algemene Secretarie Afdeeling Atjeh Zaken* juga memiliki khazanah arsip peta dan *blue-print* yang melengkapi *series-series* yang telah dibuat. Hal tersebut berkaitan dengan perbatasan wilayah Aceh dengan daerah-daerah sekitar terutama dengan Residen Tapanuli.

Contoh *Klapper Index* dalam *Afdeeling Atjeh Zaken* adalah

1873

A-B-C-E-F-G-H-I-K-M

- A. *Besluit* Gubernur Jendral 18 Mei 1873 No. 1
- Bc *Besluit* 5 Maret 1873 No. 23
- Bd *Besluit* 7 Maret 1873 No. 94
- Bi *Besluit* 19 Maret 1873 No. La Y geh
- Bj *Besluit* 2 April 1873 No. 13
- Bk *Besluit* 20 Maret 1873 No.1

¹²⁰ Paul van 't Veer., *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*, Jakarta: Grafitipers, 1985, hal.i.

- Bm Nota Maret 1873
- C *Besluit* G.G. 27 Mei 1873 No. 19,
- Y *Besluit* G.G.26 Nopember 1873 No. 21
- K *Besluit* G.G. 14 Maret 1873 no. La V/geh,

Contoh *Gedeponeerd Agenda* dalam *Afdeeling Atjeh Zaken*

1880

Januari - Juli = 1AZ - 18AZ

- Gedeponeerd Kommissorial 9 Januari 1880 No. 1 AZ
- Gedeponeerd Kommissorial 17 Januari 1880 No. 2 AZ
- Gedeponeerd Kommissorial 17 Januari 1880 No. 3 AZ
- Gedeponeerd Kommissorial 17 Januari 1880 No. 7 AZ
- Gedeponeerd Kommissorial 10 Januari 1880 No.8 AZ
- Gedeponeerd Kommissorial 23 Januari 1880 No. 9 AZ
- Gedeponeerd Kommissorial 23 Januari 1880 No.12 AZ
- Gedeponeerd Kommissorial 24 Januari 1880 No. 18 AZ

D. Anomali *Afdeeling Atjeh Zaken* Dalam *Algemene Secretarie*

Bentuk anomali dari *afdeeling atjeh zaken* dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie* tidak luput dari latar belakang sejarahnya. Lebih jelasnya karena bertepatan dengan terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh tersebut yang memberikan energi besar pada Pemerintah Hindia Belanda terutama dari segi pembiayaan, administrasi dan kebijakan politik yang sifatnya cepat. Dalam segi pembiayaan, tentunya diperlukan biaya yang cukup besar dan tepat sasaran terutama di bidang militer. Bidang militer tentunya berkaitan dengan personil dan peralatan perang. Pembiayaan juga diperlukan untuk transportasi dan kapal perang. Dari segi kebijakan politik juga memerlukan keputusan yang cepat karena dalam keadaan perang tidak ada keputusan yang sifatnya ditunda. Penundaan keputusan berakibat fatal terhadap jalannya Perang Aceh. Ditambah pula data-data penduduk dan gambaran mengenai daerah di wilayah Aceh agar keputusan yang didapat melauai data-data yang tepat. Dari segi administrasi juga sangat penting dikarenakan dalam keadaan perang diperlukan keputusan-keputusan yang cepat. Tentunya hal tersebutlah dibuat sistem administrasi yang cepat.

Dari segi pembiayaan, Pemerintah Hindia Belanda tentunya tidak ingin mengalami kerugian. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya surat-surat *gedeponeerd agenda* dari *Algemene Secretarie* yang berisi laporan pengangkutan barang. Ditambah lagi surat-surat

diplomasi kepada Konsulat Jenderal di Penang untuk meminta izin memasuki wilayahnya. Hal ini juga sangat menghemat bagi Pemerintah Hindia Belanda sehingga kapal-kapal perang menuju dan kembali dari Aceh tidak harus menuju Batavia. Tak lupa korespondensi dengan pedagang-pedagang China untuk membiayai beberapa kebutuhan perang bagi Pemerintah Hindia Belanda.

Dari segi kebijakan politik, Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu juga tidak main-main. Hal ini juga ditambah dengan kekalahan Pemerintah Hindia Belanda yang mengalami kekalahan pada fase pertama yaitu tahun 1873. Dengan kekalahan Pemerintah Hindia Belanda pada fase pertama membuat mereka tidak ingin mengalami kekalahan kembali. Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu berusaha membuat keputusan yang lebih hati-hati. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya *verslagen*, *telegrammen*, dan hasil investigasi sehingga dalam setiap *series*-nya begitu lengkap dan rapi. Data-data mengenai jumlah penduduk serta keadaan geografis setiap wilayah aceh juga tersaji untuk membantu kevalidan keputusan yang diambil. Tentunya kesemuanya itu dibuat agar keputusan yang dibuat oleh petinggi-petinggi di Pemerintahan Hindia Belanda terutama Gubernur Jenderal agar lebih baik dan hati-hati.

Dalam sistem administrasi juga tak luput diistimewakan. Untuk kepentingan administrasi seperti surat-surat korespondensi diberikan kode AZ yang merupakan inisial dari *Atjeh Zaken*. Tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam kepentingan administrasi terutama *Algemene Secretarie* yang memiliki peran utama dalam proses administrasi tersebut. Tentunya dapat dibuktikan dengan *toegangen* yang selalu diberi kode AZ. Penentuan kode AZ ini juga mempercepat penemuan kembali arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Nomor yang dibuat juga sesuai dengan kronologis sehingga memudahkan dalam pencarian kembali. Dari sinilah diketahui bahwa meskipun sistem kearsipan dari suatu khazanah arsip sudah ditentukan sebelumnya namun dalam keadaan tertentu dapat berubah disesuaikan dengan kepentingan arsip-arsip tersebut. Meskipun hal itu dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda yang tentunya mengadopsi dari sistem yang sudah diterapkan di Negeri Belanda.

KESIMPULAN

Dari kesemuanya itu, dapat dilihat bahwa dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie* meskipun memiliki sistem yang telah baik dengan *toegangen* (jalan masuk) yang bervariasi tetapi memiliki ke-anomali-annya tersendiri. *Afdeeling Atjeh Zaken* telah membuktikan itu. Dengan keadaan perang yang mendesak sehingga dibuatlah penataan arsip dan sarana temu balik yang berbeda. Hal itu dibuat agar terjadi efisiensi waktu, biaya, dan tempat. Keputusan-

keputusan yang dibuat pada masa Perang Aceh dibuat secepat mungkin karena sifatnya darurat dan mendesak. Hal itu berakibat pula pada penataan arsipnya. Penataan arsip *Afdeeling Atjeh Zaken* dalam dibuat khusus agar memudahkan para penguasa di Pemerintahan Hindia Belanda untuk mengambil kebijakan dan keputusan tertentu. *Algemene Secretarie* yang merupakan khazanah arsip dengan volume besar serta perannya sangat besar dalam proses administrasi di Pemerintah Hindia Belanda akhirnya membuat sistem kearsipan istimewa untuk daerah Aceh dikarenakan kebutuhan yang berbeda. Inilah yang disebut anomali dalam sebuah khazanah arsip yang harus juga dipelajari agar dapat memudahkan dalam pencarian arsip.

Dari pemaparan di atas, dapat dibuat kesimpulan yaitu:

1. Penataan arsip dalam khazanah arsip tertentu bukanlah penataan arsip yang benar-benar yang *fixed*. Semuanya bisa berubah sesuai dengan keadaan tertentu sehingga harus dipelajari latar belakang sejarahnya mengapa terjadi perubahan dalam penataan arsipnya.
2. Sistem kearsipan dalam sebuah khazanah arsip tertentu dibuat untuk kepentingan tertentu. Hal tersebut dilihat dari *Afdeeling Atjeh Zaken* dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie*. Dalam *Afdeeling Atjeh Zaken* terdapat penataan arsip tersendiri walaupun masih dalam lingkup khazanah arsip *Algemene Secretarie*.
3. Dalam keadaan darurat dan keadaan tertentu diperlukan penataan arsip yang berbeda dari yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu, biaya, dan tempat. Perang Aceh yang berlangsung membuat Pemerintah Hindia Belanda harus memberi keputusan yang tepat dan cepat sehingga diperlukan penataan arsip yang berbeda. Ini terjadi pada *Afdeeling Atjeh Zaken* pada khazanah arsip *Algemene Secretarie*.

DAFTAR PUSTAKA

- Brunton, Paul dan Tim Robinson. 1993. "*Arrangement and Description*" dalam *Keeping Archives Second Edition, Edited by Judith Ellis*. Victoria: Thorpe in association with The Australian Society of Archivists Inc.
- Daryan, Yayan dan Hardi Suhardi. 1998. *Terminologi Kearsipan Indonesia*. Jakarta: PT Sigma Cipta Utama.
- Dwiandari, Nadia F. 2010. "*Archives Management as a Reflection of Bureaucracy Development: The Case of Transitional Dutch East Indies, 1816-1830*" dalam Jurnal Kearsipan, Volume 5, ANRI.

- Dwiandari, Nadia F., Dwi Nurmaningsih, dan M.Haris Budiawan. 2011. *Guide Arsip Algemene Secretarie (1816) 1819-1950*. Jakarta: Direktorat Pengolahan Kedepuitan Bidang Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Gaastra, Femme S. 2003. *The Dutch East India Company, Expansion and Decline*. Leiden: Walburg Pers.
- Gunarto, Imam., 2010 “*Memahami Arsip dari Filsafat Ilmu: Kajian Awal tentang Ilmu Kearsipan*” dalam Jurnal Kearsipan, Volume 5, ANRI.
- Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah* bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43.
- Kramer, Rob dan A.M. Tempelaars., 1990. *Inventaris van het Archief van de Algemene Secretarie, (1816) 1819-1942*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Lohanda, Mona., Sulisty Basuki, dkk., 1996. *Arsip Nasional Republik Indonesia: Dalam Gerak Langkah 50 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Lohanda, Mona., 2010 “*Mengenal Sumber Sejarah*” dalam Jurnal Kearsipan, Volume 5, ANRI.
- McKemmish, Sue., 1993. “*Introducing Archives and Archival Programs*” dalam *Keeping Archives Second Edition, Edited by Judith Ellis*. Victoria: Thorpe in association with The Australian Society of Archivists Inc.
- Moeimam, Susi dan Hein Steinhauer., 2008. *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Stoler, Ann Laura., *Along the Archival Grain: Thinking Through Colonial Ontologies*, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Tim Puslitbang Arsip Nasional Republik Indonesia., 1991. *Sistem Kearsipan Zaman Hindia Belanda*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan*.
- Veer, Paul van't., 1985. *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*. Jakarta: Grafitipers.